



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat mengenal korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan uang negara atau institusi perekonomian sebagai upaya untuk meraih keuntungan pribadi. Di Indonesia khususnya, kasus penyalahgunaan uang negara telah menjadi polemik tak berujung. Menurut Azhar (2003:28), korupsi berasal dari bahasa latin *corruptus*. Artinya, perubahan signifikan kondisi keadilan, kejujuran, dan kebenaran yang terpelihara dalam suatu masyarakat.

Selain itu, pengertian korupsi juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo undang-undang No. 20 tahun 2001. Undang-undang ini merumuskan korupsi ke dalam tiga puluh jenis tindak pidana yang dirangkum dalam 13 butir pasal (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006:19).

Transparency International (TI) meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI) dengan menempatkan Indonesia di urutan ke-114 pada tahun 2013. CPI merupakan data gabungan dari 13 data korupsi dari berbagai lembaga independen. Data ini digunakan untuk membandingkan tingkat korupsi di sektor publik pada beberapa negara.

Tabel 1.1.1 Peringkat dan skor *Corruption Perception Index* (CPI)

Peringkat	Negara	Skor
1	Denmark	91
1	New Zealand	91
3	Finland	89

3	Sweden	89
5	Norway	86
5	Singapore	86
7	Switzerland	85
8	Netherlands	83
9	Australia	81
9	Canada	81
11	Luxembourg	80
...
114	Indonesia	32
...
173	South Sudan	14
174	Sudan	11
175	Afghanistan	8
175	Korea (North)	8
175	Somalia	8

Sumber: <http://www.transparency.org/cpi2013/results>

Dari tabel di atas, Indonesia menempati urutan ke-114 dengan skor 32. Skor ini didapat dari kasus korupsi yang terjadi pada sektor publik, yakni korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. Rentang skor 0-100 merupakan indikasi tingkat korupsi. Semakin rendah nilai skor yang didapat berarti semakin banyak kasus korupsi yang terjadi, begitupun sebaliknya.

Negara-negara maju mendominasi peringkat teratas dari *Corruption Perception Index*. Sedangkan, skor cukup rendah menjadi teguran bagi negara berkembang (*Developing Countries*) yang belum dapat menegakkan hukum dengan sempurna. Hal ini dikarenakan terlalu banyak kepentingan yang berbenturan. Sehingga, penegakan hukum masih bisa dinegosiasi.

Kasus korupsi yang terjadi pada Bumi Pertiwi tidak hanya dalam ruang lingkup pemerintahan pusat saja. Menurut *JPNN.com* dalam artikel yang berjudul “Kepala Daerah Terjerat Korupsi” edisi Sabtu, 15 Februari 2014, pada awal tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) menyebutkan sebanyak 318

orang dari keseluruhan 524 kepala daerah dan wakil kepala daerah terjerat kasus korupsi.

DKI Jakarta sebagai Ibu Kota dinilai sebagai cerminan negara. Sederet kasus yang terjadi wajar bila menjadi sorotan media. Salah satunya dalam bidang pembangunan. Demi mencapai Jakarta yang lebih baik, Gubernur yang saat itu menjabat, Joko Widodo beserta pemerintah daerah merencanakan penambahan unit bus Transjakarta untuk meningkatkan mutu transportasi di Ibu Kota. Persoalan kemacetan yang terus-menerus melanda, salah satunya disebabkan oleh warga yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, dibandingkan menggunakan transportasi umum.

Namun, dalam perjalanannya program pengadaan bus TransJakarta ini berubah menjadi suatu masalah. Dugaan korupsi dan nepotisme disinyalir merongrong proyek pengadaan bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun. Kasus ini bermula ketika mantan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta yang kini telah mendekam di penjara, Udar Pristiono beserta sekretarisnya Drajat Adhyaksa terseret dalam dugaan penyelewangan dana program Gubernur DKI Jakarta. Kemudian, Michael Bimo Putranto sebagai teman Joko Widodo menjadi daya tarik tersendiri dalam pemberitaan ini.

Kedekatan Bimo dan Jokowi mulai terjalin sejak masa kampanye pemilihan Wali Kota Solo. Terlebih kedekatan mereka berlanjut hingga Jokowi maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014 lalu. Dalam kasus ini, Bimo diduga menjadi “perantara” supaya proyek yang merugikan negara kurang-lebih Rp 53 miliar ini berjalan lancar.

Menurut Lubis (1995:201) sistem birokrasi patrimonial yang didasari oleh aspek kekerabatan tanpa melihat keahlian yang dimiliki seorang aparatur negara dapat menyebabkan terjadinya nepotisme. Maka, penyimpangan yang terjadi di

Indonesia seperti korupsi dan kasus kriminal lainnya wajar bila terus terjadi selama sistem ini belum diperbaiki.

Beberapa media massa nasional seperti, Majalah *Tempo*, Majalah *Detik*, Harian *Kompas*, dan beberapa media lainnya turut menjadikan kasus ini sebagai berita utama. Terlebih saat sosok Jokowi diduga ikut terseret badai korupsi. Elektabilitas Jokowi yang menduduki peringkat teratas pelbagai lembaga survey negeri ini semenjak akhir tahun 2013 hingga awal tahun 2014, menjadi modal bagus bagi partai pengusungnya, PDI Perjuangan. Di lain pihak, hal ini menjadi hambatan para tokoh lain yang ingin maju dalam bursa calon Presiden dan Wakil Presiden. Kompleksitas kasus ini semakin mengarah pada muatan politisasi dalam pemberitaan media. Pasalnya, demi merebut kursi kekuasaan, lumrah dilakukan berbagai cara guna memenangkan persaingan. Meskipun, pada akhirnya kini Joko Widodo telah menjadi Presiden Republik Indonesia bersama Jusuf Kalla dalam periode 2014-2019.

Sumadiria (2011:84-89) menyebutkan seorang wartawan harus memberitakan kejadian menjadi suatu yang menarik dan relevan. Faktor keterkenalan (*prominence*) dan kedekatan (*proximity*) cukup membuat pemberitaan penyelewengan program pengadaan bus TransJakarta menjadi menarik dan relevan. Lebih lanjut, ketika melihat dari sisi *news value* dampak (*impact*) yang menonjol apabila pemberitaan ini dikonsumsi oleh masyarakat.

Media sebagai sarana penyampaian pesan berperan dalam pembentukan realitas sosial. Menurut Eriyanto, realitas tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan tuhan, melainkan suatu yang dibentuk dan di konstruksi. Dengan pemahaman ini realitas berwujud plural. Individu memiliki konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas, berdasarkan pengalaman, preferensi, pendidikan, dan lingkungan sosial (Eriyanto, 2002:15).

Berangkat dari hal itu, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana media massa nasional membongkar kasus dugaan penyelewengan dana proyek pengadaan bus Transjakarta. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana Majalah *Tempo* membongkar kasus tersebut dalam pemberitaannya. Peneliti memilih Majalah *Tempo* karena merupakan salah satu Majalah yang membuat laporan mendalam pada setiap pemberitaannya. Salah satunya adalah kasus dugaan penyelewengan dana proyek pengadaan bus Transjakarta.

Menurut Tim LSPP (2005:15) *Tempo* merupakan media yang kerap melakukan laporan mendalam pada setiap pemberitaannya. Terbit sejak Maret 1971 menjadikan Majalah *Tempo* sebagai media massa cetak yang fokus pada isu nasional, terutama bidang politik. Gaya penulisan sastrawi menjadi ciri khas majalah mingguan ini.

Di tengah pemberitaan positif mengenai program kerja pemerintah daerah DKI Jakarta oleh sebagian besar media massa nasional, Majalah *Tempo* edisi 4302 yakni, 10-16 Maret 2014 terbit dengan judul “Awat Jokowi”. Dalam pemberitaannya, mantan anggota tim sukses Joko Widodo diduga terlibat dalam penyelewengan proyek pengadaan bus Transjakarta.

Pada Majalah *Tempo* edisi 4302 terdapat laporan utama yang menelaah kasus penyelewengan proyek pengadaan bus Transjakarta. Pembongkaran berita mengenai salah seorang terduga, yakni Michael Bimo Putranto sebagai rekan Gubernur DKI Jakarta semenjak menjabat Wali Kota Solo sembilan tahun silam menjadi sorotan utama. Keterkaitan Bimo sebagai kolega lama sang pemimpin Ibu Kota kala itu menjadikan pemberitaan Majalah *Tempo* berbeda dengan lainnya. Majalah *Tempo* mengulas kasus dugaan penyelewengan dana proyek bus Transjakarta sebagai laporan utama hingga sembilan halaman, yang dibagi menjadi lima judul artikel.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana konstruksi pemberitaan Laporan Utama Majalah *Tempo* tentang dugaan korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi pemberitaan dugaan korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta dalam Laporan Utama di Majalah *Tempo* edisi 4302 (10-16 Maret 2014) dengan pendekatan framing.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Dapat memperkaya kajian mengenai pembingkai berita terhadap sebuah artikel pemberitaan. Pada akhirnya, penelitian ini akan memperkaya studi tentang media dan politik Indonesia, terutama kasus korupsi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Memberikan sebuah masukan bagi para jurnalis dalam media pemberitaan agar lebih objektif dalam menyajikan informasi kepada publik.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini hanya fokus pada empat judul artikel laporan utama dalam Majalah *Tempo* berjudul “Awasi Jokowi” edisi 10-16 Maret 2014.